

EVALUASI PROGRAM PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN DESA WISATA RINTISAN DI KABUPATEN SLEMAN

Elsa Argarita^{1*}, Erni Saharuddin²

^{1,2} Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta Sleman, Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi : elsaargarita14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan desa wisata rintisan di Kabupaten Sleman. Program ini dilatarbelakangi oleh banyaknya desa wisata yang berada pada tahap rintisan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, serta pengelolaan potensi wisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan delapan informan yang terlibat langsung dalam program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek *context*, program telah dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan melalui mekanisme perencanaan partisipatif. Dari aspek *input*, program didukung oleh narasumber kompeten dan pendanaan APBD, meskipun masih terdapat keterbatasan pada dukungan infrastruktur fisik di salah satu desa wisata. Dari aspek *process*, pelaksanaan program berjalan sesuai tahapan, namun menghadapi kendala partisipasi dan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, dari aspek *product*, program memberikan dampak positif berupa peningkatan kapasitas pengelola, inovasi produk wisata berbasis kearifan lokal, serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Secara umum, program ini berkontribusi terhadap kapasitas pengembangan Desa Wisata rintisan tetapi masih memerlukan partisipasi masyarakat yang optimal, kualitas SDM yang memadai dan penambahan dukungan infrastruktur.

Kata Kunci : Evaluasi; Pendampingan; Pelatihan; Desa Wisata.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of a mentoring and training program for pioneering tourist villages in Sleman Regency. This program is motivated by the fact that many tourist villages are still in the pilot stage with limited human resource capacity, institutional capacity, and management of tourism potential. The study used a descriptive qualitative approach with the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. Data were obtained through interviews, observations, and documentation with eight informants directly involved in the program. The results show that from a context perspective, the program has been designed based on the real needs of the community and through a participatory planning mechanism. From an input perspective, the program is supported by competent sources and APBD funding, although there are still limitations in physical infrastructure support in one of the tourist villages. From a process perspective, the program implementation proceeded according to the stages, but faced obstacles in participation and human resource capacity. Meanwhile, from a product perspective, the program has had a positive impact in the form of increased manager capacity, innovation of tourism products based on local wisdom, and an increase in the number of tourist visits.

his program contributes to the development capacity of pioneering Tourism Villages but still requires optimal community participation, adequate human resource quality and additional infrastructure support.

Keywords : *Evaluation; Mentoring; Training; Tourist Village.*

A. PENDAHULUAN

Pariwisata di Indonesia termasuk salah satu sektor strategis yang memiliki peran dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta memperkuat identitas dan citra bangsa. Dalam implementasinya, salah satu strategi yang banyak dikembangkan oleh pemerintah adalah pengembangan desa wisata berbasis *Community Based Tourism* (CBT), yaitu pendekatan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata desa (Syarifah & Rochani, 2021). Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya sekedar menjadi pihak penerima dampak akan tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan potensi alam, budaya, serta ekonomi kreatif yang dimiliki desa.

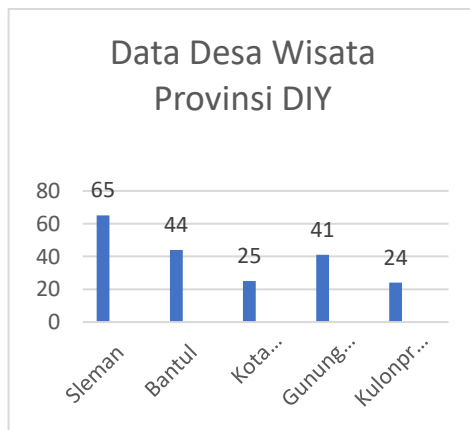
Pengembangan desa wisata menjadi penting karena keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan kemampuan kelembagaan desa dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Desa wisata menawarkan berbagai daya tarik seperti keindahan alam, tradisi, kearifan lokal, serta produk ekonomi kreatif masyarakat yang menjadi nilai khas dan mampu menarik minat

wisatawan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan desa, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengembangan destinasi (Adriwati, Ahmad, & Karunia, 2025).

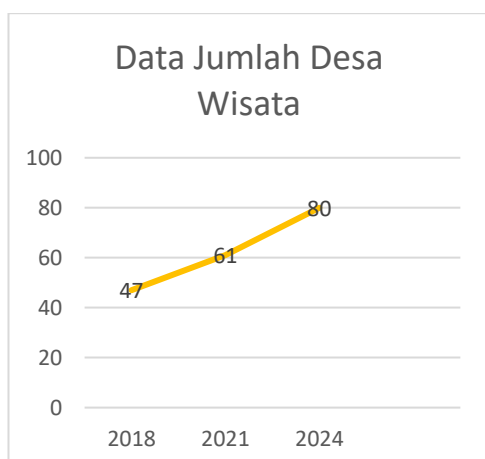
Secara nasional, perkembangan desa wisata di Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa jumlah desa wisata pada tahun 2022 mencapai 3.419 desa dan meningkat menjadi 4.573 desa pada tahun 2023 (Kemenparekraf, 2024). Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi lokal sebagai daya tarik wisata. Tren serupa juga terlihat di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai salah satu desa wisata unggulan di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan potensi alam yang melimpah. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, serta promosi desa wisata.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah dengan jumlah desa wisata terbanyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data Jejaring Desa Wisata (Jadesta, 2024), Sleman memiliki 65 desa wisata, lebih banyak dibandingkan Bantul, Gunungkidul, Kota

Yogyakarta, maupun Kulon Progo



Gambar1.1 Berdasarkan klasifikasi laporan akhir Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, terus meningkat pertahunnya dari tahun 2018 hingga tahun 2024.



Gambar 1.2. Jumlah desa Wisata Kabupaten Sleman 6 Tahun Terakhir Sumber (Klasifikasi Laporan Akhir Dinas Pariwisata tahun 2018-2024)

Peningkatan jumlah desa wisata di atas, sebagian besar desa wisata masih dikategorikan sebagai desa wisata rintisan. Desa wisata yang dikategorikan rintisan terdapat 50% dari total keseluruhan desa wisata di kabupaten Sleman. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil klasifikasi laporan akhir Dinas Pariwisata Kabupaten

Sleman masih terdapat 50% desa wisata yang masih di kategorikan desa wisata rintisan.



Gambar 1.3. Jumlah desa Wisata Kabupaten Sleman 6 Tahun Terakhir Sumber Klasifikasi laporan Akhir Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman 2024

Sebagai bentuk intervensi kebijakan, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mengambil langkah strategis dalam membantu perkembangan desa wisata. Salah satu upaya tersebut berupa program pendampingan dan pelatihan desa wisata secara berkelanjutan, Program pendampingan dan pelatihan tersebut di fokuskan pada desa wisata yang masih berstatus desa wisata rintisan.

Program pendampingan desa wisata yang dilaksanakan melalui program usulan partisipasi masyarakat (PUPM) atau pokok pikiran (Pokir) dewan dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pengelola desa wisata melalui kegiatan pelatihan singkat. pendampingan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dan di pilih berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh dinas pariwisata, diantaranya adalah desa wisata tersebut memiliki Surat keputusan (SK) penetapan sebagai desa wisata oleh Kepala Dinas

Pariwisata atau Bupati Kabupaten Sleman.

Namun, dalam pelaksanaan masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasinya. Beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan aspek implementator, seperti belum optimalnya pemilihan dan penyesuaian karakteristik peserta dengan kebutuhan materi pelatihan, sehingga masih terdapat peserta dengan pemahaman yang rendah terhadap materi serta keterbatasan kemampuan dalam menerapkan digitalisasi promosi. Selain itu, implementator belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor usia dan kemampuan adaptasi peserta terhadap teknologi baru dalam penyusunan metode pelatihan dan pendampingan. Selain itu, belum optimalnya partisipasi masyarakat dan variasi kapasitas kelembagaan antar desa wisata yang memengaruhi efektivitas program. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana program pendampingan dan pelatihan tersebut telah berjalan sesuai dengan kebutuhan desa wisata rintisan serta apakah hasil yang dicapai telah memenuhi tujuan yang ditetapkan.

Penelitian ini secara komprehensif mengevaluasi program pendampingan dan pelatihan desa wisata rintisan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam dalam (Taufiqurrahman et al., 2022) yang masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Kabupaten Sleman. Evaluasi tersebut mengambil tiga lokus yaitu Desa Wisata Embung Opak, Desa Wisata Argomulyo dan Desa Wisata Sendang Bandung. Ketiga desa wisata tersebut mewakili wilayah Sleman bagian Utara dan Sleman Bagian Barat yang memiliki permasalahan serupa seperti banyaknya kendala dalam

pengelolaan desa wisata. Ketiga desa wisata tersebut dipilih karena mencerminkan kondisi umum desa wisata yang masih berproses menuju kemandirian dan keberlanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi untuk menganalisis pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan desa wisata rintisan di Kabupaten Sleman, Merriam, 2009 dalam (Waruwu, 2024). Pendekatan ini dipilih untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terkait implementasi program, kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, serta capaian program dalam konteks empiris. Model evaluasi yang digunakan adalah CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam dalam (Asnur, 2025), yang menilai program berdasarkan aspek kebutuhan (*context*), kesiapan sumber daya dan perencanaan (*input*), pelaksanaan kegiatan (*process*), serta hasil dan dampak program (*product*).

Lokasi penelitian tersebut berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada tiga desa wisata berstatus rintisan yang mengikuti program pendampingan dan pelatihan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Sumber data dari penelitian tersebut meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pelaksanaan program, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen perencanaan, laporan kegiatan, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Informan dalam penelitian ini

ditentukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu berdasarkan keterlibatan langsung dalam program. Informan berjumlah 8 orang yang terdiri atas Staff Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, tiga ketua Pokdarwis, tiga peserta pelatihan, dan fasilitator program. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi Arikunto dalam (Kurniawan et al., 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2016) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat di jelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukan setengah dari desa wisata Kabupaten Sleman masih dalam tahap pengembangan. Meskipun mempunyai daya tarik berbasis alam dan kearifan lokal namun, pengelolaannya masih belum optimal. Dengan ini, intervensi program pendampingan dan pelatihan menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi desa wisata rintisan menuju tahap berkembang. Berdasarkan hal tersebut, pembahasan selanjutnya akan di evaluasi menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam (Meiklejohn et al., 2023) dengan menyajikan gambaran menyeluruh terkait efektivitas program dalam mengurangi jumlah desa wisata yang

berkategori desa wisata rintisan di Kabupaten Sleman dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya.

1. Context

Evaluasi konteks (*Context*) bertujuan untuk menilai bagaimana kebutuhan, relevansi tujuan program serta kesesuaian program pendampingan dan pelatihan dengan kondisi nyata desa wisata rintisan di kabupaten Sleman ini, Stufflebeam & Shinkfield dalam (Winaryati et al., 2021). Permasalahan utama yang melatarbelakangi dirumuskannya program pendampingan dan pelatihan desa wisata rintisan tersebut yaitu rendahnya kapasitas dan pemahaman mengenai tata kelola pariwisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff bidang SDM dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman mengungkapkan bahwa masyarakat desa pada umumnya mempunyai potensi wisata yang beragam baik potensi alam, budaya hingga ekonomi kreatif. Akan tetapi keterbatasan pengetahuan terkait pembentukan dan pengelolaan pokdarwis menjadi tantangan dalam pengembangan desa wisata. Sehingga program tersebut ditetapkan sebagaimana respon terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas desa wisata, sebagaimana disampaikan oleh Staff bidang SDM Dan Usaha Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman (Bapak J, 07-01-2026):

"Sebenarnya itu bermula dari kurangnya pengetahuan masyarakatnya terkait dengan pariwisata dan lain-lain, jadi intinya masyarakat belum tahu tentang kepariwisataan, kelembagaan, terus destinasi dan lain-lain itu. Di sebuah desa itu kan juga banyak potensinya, makanya mereka diarahkan untuk

mengikuti kegiatan musrenbang dan jadi itu usulan dari masyarakat”

Lebih lanjut, proses perumusan permasalahan dan pemenuhan kebutuhan desa wisata dalam program tersebut dilaksanakan secara partisipatif usulan masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, dimulai dari musyawarah tingkat Dukuh, dilanjutkan musyawarah Kalurahan dan dibahas melalui musrenbang tingkat kapanewon, hingga dikoordinasikan dengan OPD terkait. Sebelum dilaksanakan pelaksanaan pelatihan, tim pelaksana terlebih dahulu melaksanakan identifikasi langsung melalui kalurahan dan masyarakat yang bertujuan untuk memastikan bahwa materi dan bentuk pendampingan yang diberikan benar-benar relevan dengan kondisi desa wisata rintisan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Staff Bidang SDM dan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman (Bapak J, 07-01-2026):

“Pelatihan ini berdasarkan kemauan dari masyarakat sendiri yang setelah itu didiskusikan dimulai dari musyawarah dusun, musyawarah kalurahan dan akhirnya musrenbang”

Sebelum pelatihan dilaksanakan, tim pelaksana melakukan koordinasi dan pertemuan dengan pihak kalurahan terlebih dahulu. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas terkait kebutuhan desa wisata, termasuk dalam menentukan materi yang relevan untuk diangkat dalam pelatihan tersebut. Proses ini menjadi langkah penting guna memastikan bahwa program yang dirancang selaras dengan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi oleh desa wisata rintisan.

Program pendampingan dan

pelatihan tersebut dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, dengan fokus kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, seperti strategi promosi, penyusunan paket wisata, maupun peningkatan kapasitas pengelolaan dan kelembagaan.

Berdasarkan pendapat narasumber pendampingan dan pelatihan tersebut, memang perlu di dampingi secara berkelanjutan, dikarenakan desa wisata rintisan ini memang benar-benar perlu dibentuk dari 0. Kondisi tersebut disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang masih belum memahami secara utuh bagaimana konsep desa wisata. Masyarakat masih cenderung membangun destinasi wisata tanpa memaksimalkan aktivitas keseharian masyarakat sebagai daya tarik utama yang mencerminkan kearifan lokal. Selain itu, masyarakat masih menemukan kendala dalam mengidentifikasi potensi desa, menyusun paket wisata yang menarik, membangun branding desa dan mempromosikan produk desa wisata yang menarik wisatawan. Oleh karena itu, program pendampingan dan pelatihan ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi desa wisata yang lebih terarah. Pernyataan ini, telah di sampaikan oleh Bapak A selaku pendamping dan narasumber Desa Wisata (23-01-2026):

“Kalo yang rintisan masih sangat banyak kebutuhan karena kebanyakan masyarakat belum tau konsep desa wisata itu seperti apa, mereka memiliki banyak potensi seperti budaya, religi, dan UMKM tapi belum tau bagaimana cara mengemas potensi itu menjadi paket wisata yang siap dijual, termasuk dalam hal branding dan promosi”

Keterbatasan pemahaman tersebut

sangat berdampak pada integritas dalam mendorong pengembangan berbagai potensi di desa wisata. Masyarakat desa wisata ini cenderung menilai potensi secara terpisah dan belum berbentuk paket wisata yang sistematis dan siap dipasarkan. Selain itu, berbagai tantangan juga terlihat pada aspek branding dan promosi desa wisata, yang umumnya belum memiliki identitas dan citra destinasi yang kuat, sehingga sulit dalam bersaing dengan desa wisata yang sudah berkembang atau maju.

Dari hasil wawancara dengan ketua Desa Wisata Embung Opak, telah diketahui sumberdaya manusia di desa wisata tersebut masih terbatas dalam menjalankan fungsi organisasi dan kurang mampu dalam berketrampilan secara teknis pengelolaan, prosedur, tata Kelola destinasi dan aspek dasar kepariwisataan. Pernyataan tersebut sebagaimana telah di sampaikan oleh bapak H Ketua Pengelola Desa Wisata Embung Opak (04-02-2026):

"Kemarin kami kan mau merintis desa wisata, tapi secara garis besar kami sudah ada organisasinya, tapi kami belum punya skill untuk menjalankannya, bagaimana prosedurnya dan lain-lain, belum ada bekal tentang kepariwisataan."

Berdasarkan pendapat tersebut, meskipun kelembagaannya sudah terbentuk, akan tetapi keberadaan organisasi ini belum sepenuhnya di imbangi dengan kapasitas sumberdaya manusia yang memadai, yang mana masyarakat belum mempunyai ilmu yang cukup dalam mengembangkan desa wisata, meningkatkan standart pelayanan wisata, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kesiapan struktural dan kesiapan kapasitas individu dalam organisasi.

Berbeda dengan Desa Wisata Argomulyo dan Desa Wisata Sendang Bandung yang memiliki permasalahan yang sama. Permasalahan tersebut yaitu kurang sadar akan potensi sekitar dan belum mengelola potensi yang ada. Yang mana kedua desa wisata ini menjelaskan bahwa masyarakat belum mengetahui akan potensi yang dapat di optimalkan dan dikembangkan sebagai daya tarik bagi wisatawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi tersebut terletak pada kurang tumbuhnya kesadaran terhadap nilai ekonomi dan sosial pada potensi ini.

Perlu menegaskan kembali bahwa program pendampingan dan pelatihan desa wisata rintisan ini, harus di fokuskan pada penguatan aspek pengelolaan kepariwisataan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Temuan lapangan menunjukkan bahwa program pendampingan dan pelatihan dirumuskan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat desa wisata rintisan, khususnya terkait dengan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman tata kelola kelembagaan, penyusunan paket wisata, promosi, branding, dan prosedur oprasional pengelolaan desa wisata. Selain itu, proses pemenuhan kebutuhan dilakukan secara partisipasif dengan melalui mekanisme musyawarah dukuh, Kalurahan, musrenbang kapanewon serta koordinasi dengan OPD terkait. Langkah identifikasi awal sebelum melaksanakan pelatihan juga dapat memperkuat kesesuaian materi pendampingan sesuai dengan kondisi desa wisata sehingga program ini tidak disusun secara instruktif akan tetapi berdasarkan kebutuhan dan permasalahan aktual di lapangan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa evaluasi konteks ini telah sejalan

dengan pendapat Stufflebeam dan Skinkfield (Suryadin 2022), yang menilai kebutuhan dan memastikan terkait tujuan program tersebut telah relevan dengan kondisi dan permasalahan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa program pendampingan dan pelatihan desa wisata rintisan di Kabupaten Sleman ini telah dirancang berdasarkan analisis kebutuhan yang jelas sehingga secara konseptual telah selaras dengan kerangka evaluasi konteks dalam model CIPP.

2. *Input*

Input dalam model evaluasi CIPP yaitu menilai bagaimana kesiapan sumberdaya, anggaran sarana prasarana dan kesesuaian desain program dengan kebutuhan sasaran Stufflebeam & Zhang, 2017 dalam (Pratama, R. A., & Suryani, D. A. 2024). Dari kesiapan program ini, dinas pariwisata tidak hanya mengandalkan sumber daya internal. Namun juga berkerjasama dengan narasumber eksternal yang kompeten sesuai dengan keahliannya. Peran dinas pariwisata difokuskan pada aspek kebijakan dan fasilitator. Sedangkan materi dan pendamping disampaikan oleh akademisi dan praktisi yang sesuai dengan bidangnya.

Pernyataan ini disampaikan oleh staff bidang SDM dan usaha pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman (Bapak J, 07-01-2026) :

“ Dari dinas cuma terkait kebijakan dan persiapan. Tapi kalau ilmu dan materi, kita pakai orang dari luar dinas, bisanya dari akademisi maupun praktisi, jadi kita menggandeng akademisi sebagai narasumber maupun pendamping. Atau praktisi pariwisata yang sudah berpengalaman dan mandiri, karena mereka sudah pernah di posisi

seperti desa wisata itu jadi sudah paham.”

Pelaksanaan program ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman menjalin kolaborasi dengan narasumber yang memiliki kompetensi pada bidang tersebut, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Sementara itu Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman hanya berperan dalam memberikan arahan dan memastikan kesesuaian program dengan kebijakan yang berlaku. Keterlibatan akademisi dan praktisi sebagai pendamping dan narasumber bertujuan untuk memperkuat landasan konseptual sekaligus menghadirkan pendekatan praktis dan ilmiah dalam perkembangan desa wisata.

Selanjutnya dari aspek anggaran, program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman. Anggaran tersebut telah dirancang jauh hari melalui perencanaan daerah. Akan tetapi, dalam anggaran ini, dukungan sarana prasarana fisik tidak menjadi fokus utama program, dikarenakan pendekatan yang digunakan lebih ke penguatan Sumber daya manusia dan potensi.

Sebagaimana telah diungkapkan oleh staff SDM dan usaha pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, (Bapak J, 07-01-2026):

“Anggarannya dari pemerintah, APBD Sleman sendiri. Dan Kalau sarana prasarana kita tidak pernah memberikan sarpras berupa fisik. Sekarang juga ada efisiensi anggaran, jadi kita lebih ke penguatan SDM-nya. Kalau ada beban biaya, semuanya dari anggaran pemerintah.”

Satu paket kegiatan pelatihan ini, anggaran yang digunakan dialokasikan

sekitar Rp.38.000.000-. Anggaran tersebut digunakan untuk biaya tempat, honor narasumber dan tenaga pendamping, namun apabila desa wisata membutuhkan tambahan seperti pembuatan video promosi, dana yang dialokasikan sekitar Rp.8.000.000

Hal tersebut diungkapkan oleh Staff SDM Dan usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman (Bapak J, 07-01-2026):

"Anggarannya semua lengkap itu sekitar 38 jt, nanti ada klasikal 1 hari, 1 hari kunjungan lapangan setelah itu 3 bulan pendampingan pelatihan untuk honor pendamping dan narasumber itu sekitar 38 jt. Dan nanti kalo mereka butuh buat video nanti ya ada tambahan sekitar 8jt".

Rincian anggaran ini, menunjukkan adanya fleksibilitas program dalam menyesuaikan kebutuhan masing-masing Desa Wisata. Khususnya pada aspek promosi dan branding. Dengan demikian, dukungan tidak hanya difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akan tetapi juga penguatan media promosi untuk berbagai strategi pengembangan desa wisata rintisan secara berkelanjutan.

Di lihat dari sisi penganggaran ini, secara kebutuhan sudah mencukupi dikarenakan program tersebut telah dirancang dua tahun sebelumnya, sehingga keseluruhan kebutuhan biaya dan teknis telah diperhitungkan secara rinci.

Hal tersebut telah diungkapkan oleh staff bidang SDM dan Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman (Bapak J, 07-01-2026):

"Insyaallah mencukupi. Karena kita sudah melalui proses perencanaan dua tahun sebelumnya. Semua sudah

dirinci, ada biaya tempat, narasumber, tenaga pendamping dan lain-lainnya, jadi semua sudah tercover."

Akan tetapi Anggota Pengelola Desa Wisata Desa Wisata Sendang Bandung mengungkapkan bahwa mereka masih membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur di wilayah desa wisata tersebut. Pernyataan ini diungkapkan oleh anggota pengelola Desa Wisata Sendang Bandung (Ibu T, 16-01-2026):

"Sudah memadai semuanya. Cuma kita sebenarnya butuh anggaran untuk jembatan di lokasi sana karena itu jembatan buatan kami yang nanti bakal hanyut ketika kena banjir. Intinya yang menjadi kendala di sarprasnya itu kalo semuanya sudah oke"

Hal tersebut menunjukkan, meskipun anggaran dalam pengembangan desa wisata telah tercover, akan tetapi desa wisata juga membutuhkan kesiapan infrastruktur. Sarana fisik yang belum memadai juga dapat menghambat aksesibilitas, kenyamanan, serta keamanan pengunjung yang dapat berpengaruh terhadap daya saing destinasi.

Selanjutnya dari aspek materi, informan menyampaikan bahwa materi dan bahan pelatihan yang diberikan dalam program ini telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Hal ini telah didiskusikan melalui FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilaksanakan sebelum melakukan pendampingan, sehingga materi yang disampaikan dapat tepat sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dari masing-masing desa wisata. Sebagaimana telah disampaikan oleh pendamping dan narasumber program pelatihan dan pendampingan Desa Wisata (Ibu E, 21-01-2026):

Sudah karena setiap kali melakukan pendampingan saya FGD terlebih dahulu sehingga kesesuaian materinya itu sangat tepat sasaran”

Yang telah diperkuat oleh anggota pengelola Desa wisata Argomulyo (Bapak P, 07-02-2026) yang menyatakan bahwa

“Materi sudah sangat cocok untuk desa wisata rintisan seperti kami, materi yang diberikan jelas dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan”

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan pelatihan ini dinilai sudah sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dan cara penyampaian pendamping juga dinilai cukup optimal baik dalam praktik materi maupun lapangan.

Meskipun sudah menunjukan hasil yang baik dari kesiapan administratif baik dari dalam kesesuaian materi, kebutuhan yang relevan dan finansial yang cukup dalam mencapai kebutuhan ini, namun dalam pernyataan temuan dilapangan dukungan anggaran masih perlu ditingkatkan lagi, khususnya pada aspek infrastruktur fisik untuk menunjang oprasional keberlanjutan desa wisata.

3. **Process**

Process dari model evaluasi CIPP menilai pelaksanaan program dari sisi mekanisme metode, peserta dan pengendalian kegiatan Rusydi Ananda dan Tien Rafida (Suryadin, 2022). Yang mana proses pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan desa wisata rintisan ini telah dilaksanakan melalui tahapan sistematis mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir kegiatan.

Pelaksanaan ini diawali dengan penyusunan perencanaan dua tahun sebelum implementasi melalui mekanisme PUPM. Pada tahapan tersebut, Dinas

Pariwisata Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Bappeda dalam menyusun pelaksanaan program hingga anggaran. Setelah selesai dirancang, dokumen tersebut diajukan untuk di review sebelum melakukan penginputan program ke sistem perencanaan daerah.

Pada tahapan ini, kegiatan diawali dengan adanya rapat koordinasi internal untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan kebutuhan yang relevan untuk pelaksanaan program ini. Program pendampingan dan pelatihan tersebut berlangsung selama tiga bulan dengan pertemuan minimal delapan kali. Selain itu terdapat penguatan oleh narasumber dan studi banding untuk memberikan gambaran terkait pengelolaan desa wisata dan inovasi produknya.

Hal ini telah diungkapkan oleh staff Bidang SDM dan usaha pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman (Bapak J, 07-01-2026):

Awalnya dari PUPM mulai dua tahun sebelumnya, kita buat kamus kerja sama dengan Bappeda, isinya terkait pelatihan dan syaratnya. Setelah direview dan disetujui, disebar ke kapanewon dan kalurahan untuk memilih kebutuhan. Setelah diverifikasi OPD, kita buat jadwal dan laksanakan pendampingan selama tiga bulan, lalu ada materi penguatan dan studi banding”.

Tahapan selanjutnya, setelah dilakukan pendampingan selama 3 bulan, dinas pariwisata Kabupaten Sleman dan pendamping program tersebut, masih melakukan pengawasan dan monitoring terhadap perkembangan dan jalannya desa wisata setempat. Monitoring ini dilakukan melalui *group whatsapp* sebagai media komunikasi.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pendampingan dan pengawasan telah terstruktur secara fleksibel dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan apabila dalam pelaksanaan dan pengawasan tersebut mengalami kendala, maka dilakukan klarifikasi secara langsung melalui pertemuan tatap muka untuk mencari sumber permasalahan dan mencari solusi yang tepat dan disepakati bersama.

Pelaksanaan pendampingan dan pelatihan Desa Wisata ini, masih terdapat kendala yang sering dihadapi di masing-masing Desa Wisata, yang menjadi faktor utama permasalahan ini adalah sumber daya manusia (SDM) yang mana permasalahan tersebut muncul dalam hal kapasitas peserta pelatihan, ketidaksesuaian latar belakang, dan keterbatasan pemahaman terutama pada peserta yang berusia lanjut dan kurang familiar akan digitalisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Staf bidang SDM dan Usaha pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman (Bapak J, 07-01-2026):

“SDM itu pasti. Kadang peserta yang tua juga kendala. Harapannya maksimal umur 45–50, tapi di lapangan tidak seperti itu. Kadang pemilihan pesertanya juga kurang tepat.”

Pernyataan tersebut keterlibatan peserta lanjut usia menjadi suatu tantangan, terutama dalam penerimaan materi yang bersifat teknis dan penerapan digitalisasi. Selain itu, pemilihan peserta yang kurang tepat juga dapat mempengaruhi efektivitas program, khususnya apabila peserta yang mengikuti pelatihan secara umum tidak berperan strategis dalam pengelolaan desa wisata secara berkelanjutan.

Proses pemilihan peserta ini seringkali tidak dilakukan seleksi untuk kesesuaian bidang pengelolaan Desa

Wisata, akan tetapi peserta hanya ditunjuk untuk memenuhi kuota yang telah ditetapkan tanpa mempertimbangkan dampak keterlibatan langsung dalam pengelolaan Desa Wisata. Dalam peserta pelatihan ini masih banyak peserta lanjut usia yang mana hal tersebut menjadi tantangan terutama pada penerimaan materi, penerapan digitalisasi dan dapat mempengaruhi efektivitas program. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme seleksi peserta yang lebih selektif dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses kegiatan dan pelaksanaan program.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, akan lebih optimal apabila disesuaikan, terkhusus pada pelatihan digital marketing sehingga pelatihan berbasis digital marketing akan lebih efektif. Hal ini telah di sampaikan oleh Staff Bidang SDM dan usaha pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. (Bapak J, 07-01-2026):

“Kalau digital marketing, anak muda lebih paham IT jadi lebih mudah. Tapi di lapangan tidak selalu yang dikirim sesuai bidangnya.”

Selain permasalahan diatas, dari hasil wawancara Desa Wisata juga mengungkapkan bahwa adanya hambatan yang sering ditemui adalah pada sumberdaya manusia. Yang mana permasalahan tersebut semakin berkurang partisipasi masyarakatnya setiap melakukan pelaksanaan pelatihan. Hal ini diungkapkan oleh ketua Desa Wisata Argomulyo. (Bapak P 07-02-2026):

“Kalo untuk hambatannya di sumberdaya manusia (sdm) waktu ada pelatihan dan pendampingan ini sedikit demi sedikit sudah berkurang, tapi memang namanya orang banyak kan masih ada kendalanya juga kan”

Pelaksanaan tersebut juga masih perlu kekompakan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktik lapangan seperti pembuatan paket wisata, pelatihan promosi dan lain sebagainya. Hal ini diungkapkan oleh peserta Program pendampingan Desa Wisata Sendang Bandung (Ibu T, 16-01-2026):

"Dan hambatannya juga di sdm itu dan itu kan pesertanya 30 an tapi yang datang 15-20 orang saja sedangkan kita masih perlu untuk kompak dalam membuat paket wisata agar langsung terkoneksi dengan tamu gitu. Masih 50% an yang datang"

Sedangkan dari sisi kehadiran, target partisipasi peserta minimal 80% untuk mengoptimalkan keberhasilan pelatihan ini. Namun, pada kenyataan di lapangan partisipasi masyarakat hanya pada kisaran 50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat keberhasilan program pelatihan dan pendampingan Desa Wisata ini. Namun berbeda dari desa wisata Embung opak atau Sorasan, yang mana partisipasi peserta di desa wisata Embung Opak atau Sorasan menunjukkan tingkat partisipasi yang berkualitas dibandingkan desa wisata lainnya.

Hal ini dilihat dari tingginya antusiasme peserta dalam mengikuti program pendampingan dan pelatihan. Kehadiran peserta di desa wisata ini sering melebihi batas kuota yang ditentukan, kondisi tersebut menggambarkan akan komitmen, motivasi, partisipasi dan kesadaran kolektif pengelola terkait pentingnya peningkatan kapasitas pengembangan desa wisata. yang diungkapkan oleh salah satu pendamping dan narasumber program pendampingan dan

pelatihan desa wisata (Bapak A, 23-01-2026):

"Kalo desa wisata sorasan sangat luar biasa dari 30 kuota itu nanti akan lebih dari itu yang hadir lebih dari kuota. Dari beberapa desa wisata itu paling banyak partisipasinya sorasan. Dan pengelolaannya juga sangat oke. Tapi di desa wisata lainnya itu banyak yang terkendala di SDM nya juga"

Namun demikian, meskipun salah satu desa wisata tingkat partisipasinya tergolong tinggi dan pelaksanaan program juga sudah berjalan akan tetapi dari kedua desa wisata tersebut masih terkendala terhadap tingkat partisipasinya. Dan perlu adanya kreativitas dalam pelaksanaan program supaya tingkat partisipasinya semakin meningkat. Selain itu prosedur yang di rencanakan akan tetapi durasi waktu dalam pelaksanaan pendampingan dan pelatihan ini masih kurang optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pada tahap pelaksanaan masih belum sepenuhnya diikuti secara efektif dan masih perlu perbaikan baik dalam mendorong partisipasi masyarakat maupun durasi waktu yang mendukung keberhasilan program pelatihan dan pendampingan ini.

Selain tingkat partisipasi peserta dan kualitas Sumber daya manusia, para peserta pelatihan dan pendampingan juga masih memerlukan pendampingan dan pelatihan dalam jangka waktu panjang dikarenakan masih ingin belajar lebih dalam lagi terkait dengan hal kepariwisataan. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota pengelola Desa Wisata Sendang Bandung (Ibu T, 16-01-2026)

"Berjalan dengan lancar tapi kami masih membutuhkan pendampingan

lagi, tidak hanya 3 bulan, karena wacana2 ini masih ada yang belum terlaksana sebagaimana mestinya, dan kita kan juga perlu belajar lagi dan lagi kan mba buat maksimalin semuanya”

Oleh karena itu, untuk pelaksanaan program kedepan memang diperlukan mekanisme dalam seleksi peserta yang lebih tepat sasaran baik dalam proses pelatihan berbasis kebutuhan maupun kompetensi. Pemilihan peserta sebaiknya mempertimbangkan kesesuaian bidang, usia produktif dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan desa wisata, sehingga efektivitas program pendampingan dan pelatihan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Selain itu rekomendasi penambahan durasi waktu pelatihan juga mencerminkan pentingnya penyesuaian komponen proses dan dukungan program supaya lebih responsif terhadap kebutuhan riil desa wisata. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya menggambarkan kondisi empiris terkait pelaksanaan program, namun juga memberikan dasar perbaikan yang konstruktif, sebagaimana telah ditekankan oleh Stufflebeam dan Shinkfield (Meiklejohn, S, 2023) bahwa evaluasi proses ini juga harus berorientasi dalam pengampilan keputusan dan peningkatan kualitas program secara berkelanjutan.

4. Product

Product dalam model evaluasi CIPP menilai pada hasil dan dampak program terhadap peningkatan kapasitas, kinerja dan keberlangsungan desa wisata rintisan Rusydi Ananda dan Tien Rafida (Suryadin, 2022). Berdasarkan hasil wawancara, program pendampingan dan pelatihan desa wisata rintisan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

menunjukkan bahwa adanya perubahan yang signifikan dalam kapasitas pengelolaan serta inovasi produk wisata di tingkat desa.

Setelah mengikuti program tersebut, ketiga desa wisata ini mengalami kemajuan yang cukup pesat, potensi yang sebelumnya kurang berkembang kini telah dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya kunjungan dan aktivitas wisata seperti penyelenggaraan makrab, atraksi, kampung wisata edukasi, *wedding outdoor*, *family gathering* dan lain sebagainya. Sebagaimana telah diungkapkan oleh ketua dan anggota pengelola Desa Wisata Sendang Bandung (bapak A, 16-01-2026)

”Adanya kemajuan, yang tadinya potensi ini tidak berkembang sekarang jadi berjalan. Awal itu cuma sekitar 200 tamu, lalu 500, tahun 2024 mendatangkan 1000 tamu, dan 2025 ini sudah tercatat 1500 tamu. Jadi meningkat setiap tahunnya, tamu berkunjung ada yang makrab, family gathering, outdoor wedding gitu mba jadi ga hanya Cuma itu-itu saja .”

Desa Wisata Argomulyo juga menyampaikan bahwa adanya peningkatan pengunjung dari hasil inovasi yang diperoleh selama mengikuti pendampingan dan pelatihan desa wisata ini, hal tersebut telah disampaikan oleh Ketua pokdarwis (bapak P, 07-02-2026)

”Iyaa kami yang tadinya mulai dari 0 atau merintis lalu setelah itu kami ramai pengunjungnya”

Dan untuk Desa Wisata Embung opak juga menyampaikan bahwa terdapat peningkatan pengunjung setelah diadakan program tersebut. pernyataan ini disampaikan oleh anggota pengelola Desa

Wisata (Ibu A, 04-02-2026):

"Iyaa mba, kapasitas kunjungan kami meningkat juga dengan adanya pelatihan ini"

Adanya program pendampingan dan pelatihan ini menunjukkan bahwa ketiga desa wisata ini menunjukkan adanya hasil positif terhadap perkembangan desa wisata. Peningkatan jumlah pengunjung Secara signifikan dan terstruktur dari tahun ke tahun.

Salah satu dampak inovasi yang paling nyata dari program tersebut adalah munculnya inovasi berbasis kearifan lokal, pada awalnya masyarakat yang mempunyai pendapat bahwa *homestay* harus memenuhi standart yang modern, akan tetapi setelah mengikuti pendampingan justru merubah pola pikir masyarakat yang mana telah sadar akan daya tarik utama terletak pada keunikan dan kearifan lokal yang dimiliki. Hal ini telah diungkap oleh ketua pokdarwis dan anggota pengelola Desa Wisata Embung Opak/Sorasan (Ibu A, 04-02-2026):

"Awalnya bayangan kami homestay itu harus yang bagus dan mewah. Tapi setelah pelatihan, ternyata tidak sehoror itu. Tidak semua orang ingin homestay seperti bayangan kami, justru ada yang tertarik dengan kearifan lokal yang kami punya."

Dan dari perubahan cara pandang masyarakat, juga lebih memahami terkait pengelolaan daya tarik *homestay* ini menunjukkan bahwa *homestay* bukan hanya sebagai akomodasi akan tetapi sebagai media interaksi budaya dan sarana dalam memperkenalkan identitas lokal.

Selain itu, inovasi lainnya juga muncul yang mana wisatawan di ajarkan bagaimana mengelola produk UMKM khas desa wisata sorasan/Embung opak ini dan

mengubah kemasan yang lebih ramah lingkungan dan mencerminkan identitas lokal.

Hal ini telah diungkap oleh ketua dan anggota pengelola Desa Wisata Embung Opak/Sorasan: (Bapak H dan Ibu A, 04-02-2026)

"Selain itu kami kan desa wisata edukasi ya mba jadi inovasi baru kami itu mengajarkan wisatawan tentang cara mengelola wajik, batik khas sorasan, dan produk lain. Dan Produk UMKM yang tadinya pakai plastik, sekarang diubah jadi lebih khas dan ramah lingkungan. Yang kita jual justru kearifan lokalnya".

Selain itu pada desa wisata Argomulyo juga menanggapi bahwa inovasi yang ditemukan meliputi modifikasi kendaraan jeep sebagai atraksi wisata pengembangan rute perjalanan dan penguatan UMKM lokal yang mulai berjalan lebih aktif. Anggota pengelola Desa Wisata Argomulyo (Bapak P, 07-04-2026)

"Banyak sekali, termasuk modif jeep buat menarik wisatawan, rutenya juga di buat yang menarik dan UMKM-nya juga berjalan di sini. Dan mereka sudah punya jeep sendiri-sendiri untuk mendukung wisata ini".

Pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa program, pendampingan ini tidak hanya berdampak pada aspek manajerial akan tetapi mendorong kreatifitas dan diversikan dalam produk wisata. Inovasi yang dimunculkan menjadi bukti keberhasilan desa wisata dalam penguatan identitas lokal.

Oleh karena itu kontribusi terhadap pengembangan desa wisata telah dinilai positif, dikarenakan masyarakat lebih

percaya diri dalam mengemas potensi yang bernilai jual dan keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan desa wisata.

Program ini dinilai sangat signifikan dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas, kinerja dan keberlangsungan desa wisata. Ketiga desa wisata tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam pengembangan produk wisata. Potensi yang sebelumnya belum dikelola secara optimal, kini telah dimanfaatkan dan dikelola secara terarah dan terstruktur dan dari segi jumlah kunjungan wisata yang semakin meningkat dan konsisten setiap tahunnya. Selain itu peningkatan kuantitas kunjungan, dampak lain juga terlihat pada perubahan pola pikir masyarakat yang cenderung berfokus pada standart modern. Hal tersebut menegaskan bahwa hasil evaluasi produk dalam temuan ini telah selaras dengan pandangan Stufflebeam dan Shinkfield (Taufiqurrahman et al., 2022) yang menekankan pentingnya evaluasi dalam menilai sejauh mana program memberikan dampak dan manfaat dalam keberhasilan sasaran yang dituju.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan desa wisata rintisan di Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa program tersebut secara umum telah terlaksana cukup baik dan memberikan dampak positif bagi desa wisata rintisan.

Dari aspek *context*, program tersebut telah relevan dengan kebutuhan masyarakat pada dasarnya masih banyak desa wisata yang berada pada tahap rintisan dan memiliki keterbatasan terhadap pengetahuan pengelolaan pariwisata, kelembagaan, pembuatan paket wisata dan promosi wisata. Oleh karena itu program

pendampingan dan pelatihan tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola potensi desa wisata yang dimiliki. Temuan ini menunjukkan bahwa program telah sesuai dengan prinsip evaluasi konteks menurut Stufflebeam dan Shinkfield yang menekankan pentingnya identifikasi kebutuhan sebagai dasar perumusan program.

Dari aspek *input* program ini telah didukung sumberdaya yang memadai mulai keterlibatan pendamping dan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi dan penyesuaian materi pelatihan yang sudah dirancang sesuai kebutuhan desa wisata. Akan tetapi masih terdapat kendala pada segi anggaran, pada dasarnya anggaran tersebut hanya difokuskan untuk mendukung kebutuhan pengembangan desa wisata seperti pelatihan dan pendampingan dan penguatan promosi. Sementara itu salah satu desa wisata masih memerlukan tambahan anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik yang menunjang aksesibilitas dan keberlanjutan operasional destinasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan program masih perlu disinergikan dengan kebutuhan sarana prasarana di tingkat desa.

Dan dari aspek *process*, pelaksanaan program ini telah dilaksanakan sesuai tahapan yang telah dirancang sebelumnya, meskipun terdapat kendala sumber daya manusia dalam process pelaksanaan ini namun program tersebut berjalan sesuai rencana.

Sementara dari aspek *product*, program ini telah terbukti mampu dalam meningkatkan kapasitas pengelola desa wisata dalam mengembangkan potensi lokal menjadi produk wisata yang lebih inovatif, kreatif dan bernilai jual. Hal

tersebut dapat dilihat dari peningkatan aktivitas wisata, munculnya inovasi produk baru berbasis kearifan lokal, dan meningkatnya kunjungan wisatawan di beberapa desa wisata.

Keberhasilan program tersebut telah didukung oleh potensi wisata lokal yang kuat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berkontribusi terhadap perkembangan pariwisata dan adanya dukungan dari pemerintah daerah. Akan tetapi masih ada kendala internal meliputi keterbatasan komitmen dan partisipasi peserta serta kurangnya kontribusi sumberdaya manusia, sedangkan kendala eksternalnya mencakup keterbatasan infrastruktur dan dukungan kelanjutan dari berbagai pihak.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adriwati, A., Ahmad, A. F., & Karunia, L. (2025). *Evaluation of Tourism Village Development Program: Comparative Study of Lebak Regency and Ende Regency Tourism Villages*. KnE Social Sciences.
- Asnur, H. (2025). *Evaluasi Program Pelaksanaan Salat Duha Berbasis Model CIPP di SDN Kecamatan*.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. (2018). *Laporan Akhir Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten Sleman Tahun 2018*. Sleman: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. (2022). *Laporan Akhir Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten Sleman Tahun 2022*. Sleman: Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.
- Hammarberg, K., Kirkman, M., & de Lacey, S. (2016). *Qualitative research methods: when to use them and how to judge them*. *Obstetrics & Gynecology*, 26(3), 498–503.
- Kurniawan, A., Yenni, Aziz, Dara Fayola, A., Kolong, J., Nanang, Zulkarnaini, Hermayani, Rusydi, & Juniati, S. (2021). Penelitian Tindakan Kelas. In *Bumi Aksara* (Nomor June 2023). <https://www.sman2prg.sch.id/upload/file/71262145PTKAdiWahyudiNoor,S.Pd.pdf>
- Kartika, Y., Sholihah, Q., & Wanusmawatie, I. (2022). Evaluasi Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa(Kajian, Suatu Penyusunan, Pelatihan Desa, Rpjm Bojonegoro, Kabupaten Pemerintahan, Besar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* <https://doi.org/10.21776/Ub.Jiap.2022.008.02.11>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). *Jaringan Desa Wisata (JaDESTA)*. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id>
- Meiklejohn, S., Anderson, A., Brock, T., Kumar, A., Maddock, B., Wright, C., ... & Kent, F. (2023). *The utility of an interprofessional education framework and its impacts upon perceived readiness of graduates for collaborative practice. A multimethod evaluation using the context, input, process, product (CIPP) model*. *Nurse Education Today*, 121, 105707.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). Qualitative data analysis: Introduction and update. *Annual Review of Psychology*, 69, 1–20.
- Nafisatur, M. (2024). Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3(5),

- 5423–5443.
- Noviyanti, E., Nawawi, R., Perintis Kemerdekaan, J., Tangerang, K., & Banten, P. (2025). Analisis Peran Pelayanan Pemerintahan Desa terhadap Perkembangan Desa Mekarwangi Kecamatan Cisauk. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2, 1–19. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.1820> Available online at: <https://jurnal.lipkd.or.id/index.php/Sosial>
- Ngazizah, I. (2023). *Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan desa wisata dengan konsep CBT (Community Based Tourism) untuk meningkatkan pendapatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Wisata Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto]. Repository UIN Sunan Kalimantan
- Pakpahan. (2020). Metodologi Penelitian Ilmiah. Yayasan Kita Menulis. In *Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Nomor 3)*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah DIY. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/164903/pergub-diy-no-40-tahun-2020>
- Pratiwi, A. (2022). Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Di Bagian Humas Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Selatan. A042192015_tesis_Bab 1-2 ANDIANI.pdf MATEI.pdf RAHMAWATI.pdf PKL_D3SI_2022_ADELIA PRATIWI.pdf ARIFIN 2014.pdf
- Pergub DIY 40/2020, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata.
- Pratama, R. A., & Suryani, D. A. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Budaya di Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)*, 5(2), 179-195.
- Syarifah, R., & Rochani, A. (2021). Pengembangan Desa Wisata Melalui Community Based Tourism. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 109–129. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>
- Suryadin, A., Purnama Sari, W., & Nurfitriani, N. (2022). *Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, and Product)*. Samudra Biru. <https://books.google.co.id/books?id=OxamEAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Taufiqurrahman, M., Setiawan, D. B., Fitriah, R. A., & Hidayat, D. (2022). Penggunaan Model Cipp (Context, Input, Process, Dan Product) Dalam Evaluasi Program Asistensi Mengajar Di Tk Miftakhul Jannah. *MATHEdunesa*, 11(3), 677–683.

- <https://doi.org/10.26740/mathedunesa.v11n3.p677-683>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.
- Yumesri, Risnita, Sudur, & Asrulla. (2024). 6+LOA++103+publis ETIKA PENELITIAN. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 63–69.